

PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL DALAM PENGEMBANGAN PELABUHAN KENDAL

Bestyaning Sekti Widodo

Email: sbestyaning@gmail.com

Dosen Pembimbing: Drs. Turtiantoro, M.Si

Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Pelabuhan Kendal merupakan pemindahan aktivitas pelabuhan laut penumpang dan penyeberangan yang ada di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, sehingga secara fungsi, peran dan administrasinya Pelabuhan Kendal berada di bawah naungan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Pengembangan Pelabuhan Kendal menjadi pelabuhan niaga memanfaatkan potensi lokasi strategis wilayah Kabupaten Kendal yang utamanya dekat dengan Kota Semarang. Penelitian ini membahas peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dalam pengembangan Pelabuhan Kendal. Tujuan dari menelitian ini adalah untuk mendeskripsikan lebih dalam mengenai peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dalam pengembangan Pelabuhan Kendal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan kajian kepustakaan yang dilakukan kepada informan-informan terkait.

Hasil penelitian ini adalah mendeskripsikan berbagai temuan di lapangan terkait peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dalam pengembangan Pelabuhan Kendal yakni telah dibangunnya berbagai sarana prasarana utama dan pendukung di pelabuhan, adanya penganggaran dari APBD Kendal, APBD Jateng, dan APBN, adanya rencana kerjasama pengembangan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dengan BUMN, dan partisipasi masyarakat yang sangat mendukung pengembangan pelabuhan, serta adanya berbagai manfaat yang diperoleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal maupun masyarakat Kendal.

Kata Kunci: Peran Pemerintah Daerah, Pengembangan, Pelabuhan.

ABSTRACT

Kendal Port is a transfer of passenger and crossing sea port activities in the Port of Tanjung Emas Semarang, from the function, role and administration of the Kendal Port are under the auspices of the Port of Tanjung Emas Semarang. The development of Kendal Port into a commercial port utilizes the potential of the strategic location of the Kendal Regency, which is mainly close to Semarang City. This research discusses the role of the Kendal District Government in the development of the Kendal Port. The purpose of this research is to describe more deeply the role of the Kendal District Government in the development of the Kendal Port. This research uses descriptive qualitative research methods with data collection techniques through interviews, documentation, and literature review conducted to relevant informants.

The results of this research are describing various findings in the field related to the role of the Regional Government of Kendal Regency in the development of Kendal Port, namely the construction of various main and supporting infrastructure facilities at the port, the budgeting of the Kendal APBD, Central Java APBD, and the State Budget, the existence of a development cooperation plan between the Regional Government Kendal Regency with BUMN, and public participation that strongly supports to port development, as well as the various benefits obtained by the Kendal District Government and the Kendal society.

Keywords: Role of Local Government, Development, Ports.

PENDAHULUAN

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Pemberian wewenang yang luas kepada daerah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Pemberian wewenang yang luas terhadap daerah otonom diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, kekhususan, keistimewaan serta potensi keanekaragaman dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Setiap daerah diharapkan dapat memaksimalkan potensi keanekaragaman daerahnya masing-masing dalam meningkatkan daya saing dalam pengelolaannya sesuai dengan politik desentralisasi. Salah satu daerah yang menarik dan memiliki potensi tinggi adalah Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Kendal. Kabupaten Kendal menjadi daerah yang memiliki daya tarik skala nasional maupun internasional. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya Kawasan Industri Kendal (KIK) yang melibatkan 2 negara yaitu Indonesia dan Singapura yang dapat menarik perhatian internasional. Selain itu, lokasi Kabupaten Kendal sangat strategis karena dekat dengan bandara, memiliki pelabuhan sendiri, memiliki kawasan industri sendiri yaitu KIK, dilewati rel kereta api Jalur Ganda

Jakarta-Surabaya, dan memiliki jaringan jalan tol nasional. Wilayah Kendal dapat dengan mudah diakses baik lewat jalur laut, udara, maupun darat yang bisa diakses melalui jalan utama di Pulau Jawa dikarenakan posisinya strategis yang berada di jalan raya pantura Jawa.

Adanya Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Kendal Nomor 25 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Pelabuhan Kabupaten Kendal di Pantai Ngebom, Mororejo Kaliwungu, Kendal menjadi aspek legalitas penting bagi pembangunan Kawasan Pelabuhan Kendal. Pelabuhan Kendal tidak hanya berfungsi sebagai pemindahan aktivitas penyeberangan lintas Semarang–Kumai dari pelabuhan laut yang sebelumnya berada di Tanjung Emas tetapi juga merupakan suatu kawasan yang dapat meningkatkan sektor perdagangan maupun sektor transportasi di Kabupaten Kendal itu sendiri.

Untuk memaksimalkan pelayanan bagi masyarakat, Pelabuhan Kendal akan dibuat menjadi pelabuhan niaga dan dibangun terminal peti kemas yang bertaraf internasional. Pembangunan terminal peti kemas di Pelabuhan Kendal dilakukan karena mempunyai peran penting dalam mengkomodasi arus barang di Jawa Tengah karena terminal peti kemas di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang diperkirakan melebihi kapasitas pada tahun 2021 sehingga aktivitas yang *overload* tersebut nantinya akan dilimpahkan ke Pelabuhan Kendal. Terminal peti kemas nantinya akan dibangun di Pelabuhan Kendal

bagian barat, sedangkan yang bagian timur tetap fokus untuk penyeberangan. Pelabuhan Kendal ini dikembangkan dengan tujuan nantinya akan dijadikan pelabuhan niaga berbasis internasional.

Jika ditinjau dari latar belakang pembangunannya, Pelabuhan Kendal merupakan pemindahan aktivitas pelabuhan laut penumpang dan penyeberangan yang ada di Pelabuhan Tanjung Emas sekarang ini, sehingga secara fungsi, peran dan administrasinya Pelabuhan Kendal berada di bawah naungan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Pengembangan Pelabuhan Kendal memanfaatkan potensi lokasi yang strategis wilayah Kabupaten Kendal yang berada dekat dengan Kota Kendal dan terletak pada jalur pantai utara Jawa yang merupakan daerah transportasi dan perdagangan dari Jakarta ke Surabaya. Di samping itu, pengembangan Pelabuhan Kendal diharapkan mampu mendukung pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas, sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan pelayanan bagi penumpang yang memanfaatkan sarana dan prasarana tersebut.

Dalam pembangunannya, Kementerian Perhubungan dan pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Kabupaten Kendal dan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah melakukan diskusi terkait pembiayaan. Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal juga mengajukan bantuan ke pemerintah pusat mengenai pembiayaan dikarenakan Kendal sendiri tidak mampu.

Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan Kendal-Kumai beserta lintasannya merupakan perwujudan dari fokus kerja Kementerian Perhubungan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan transportasi kepada masyarakat dan meningkatkan kapasitas transportasi di daerah agar terwujud sarana dan prasarana transportasi yang layak bagi masyarakat. Segala potensi, keanekaragaman, pemerataan, dan daya saing yang ada di Kabupaten Kendal yang dikendalikan oleh pemerintah Kabupaten Kendal tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya melalui peningkatan pelayanan yang ada.

Adanya pengembangan Pelabuhan Kendal memiliki kompetensi yang relevan dengan ilmu pemerintahan meliputi pembahasan peran pemerintah daerah yang menyangkut kewenangan. Selain itu, relevan karena memiliki prospek atau daya tarik sendiri seperti adanya berbagai fasilitas dan infrastruktur pendukung meliputi Kawasan Industri Kendal, posisi dekat dengan Bandara Ahmad Yani Semarang, adanya akses Jalan Tol Trans Jawa, serta banyaknya kereta api container yang menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia semakin maju. Dalam pembahasannya, pengembangan Pelabuhan Kendal menjadi topik yang menarik karena terdapat hal yang menantang. Contohnya seperti Pelabuhan Kendal dibangun dan dikembangkan padahal sudah ada Pelabuhan Tanjung Emas Semarang terlebih dahulu dikarenakan adanya

peluang aktivitas dan transportasi laut di Tanjung Emas Semarang, selain itu juga adanya konektivitas pelabuhan dengan kereta api untuk pengembangan Pelabuhan Kendal ini. Sesuai dengan berbagai aspek tersebut, maka dapat dilihat peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dalam pengembangan Pelabuhan Kendal.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kendal, khususnya di Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal, DPRD Kabupaten Kendal, Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Kabupaten Kendal, dan Kawasan Pelabuhan Kendal. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif yang terdiri dari wawancara, studi dokumentasi, dan kajian kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pembangunan Pelabuhan Kendal

Pelabuhan Kendal dibangun sejak tahun 2001 pada masa pemerintahan H. Hendy Boedoro, SH., M.Si. Pembangunan Pelabuhan Kendal diawali dan dicetuskan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal sendiri dimana Bapak Hendy selaku Bupati Kendal pada waktu tersebut mengusulkan program pembangunan pelabuhan ke DPRD Kabupaten Kendal.

Latar belakang pembangunan Pelabuhan Kendal diawali dari adanya potensi Kaliwungu sebagai daerah perindustrian dikarenakan

memiliki banyak perusahaan sehingga muncul inisiatif proyek pembangunan besar yang bertujuan untuk membuat Kendal lebih maju. Dengan adanya prospek pembangunan besar tersebut dan salah satunya ada usulan pembangunan pelabuhan mengakibatkan banyak daerah lain di Kabupaten Kendal yang bersaing agar menjadi daerah terpilih tempat dibangunnya pelabuhan, antara lain seperti Weleri dan Cepiring. Akhirnya daerah yang terpilih akan dibangunnya pelabuhan adalah Kaliwungu dikarenakan Kaliwungu memiliki prospek yang lebih unggul dibanding daerah lain dalam bidang perindustrian. Putusan dan usulan pembangunan Pelabuhan berlanjut sampai dikeluarkannya perda mengenai tata ruang atau RUTRK.

Secara teknis, riwayat pembangunan Pelabuhan Kendal diawali adanya keinginan dari Kabupaten Kendal untuk membangun pelabuhan. Kemudian Kabupaten Kendal bekerjasama dengan Departemen Perhubungan Dirjen Perhubungan Darat yaitu Direktur LLASDP (Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Penyeberangan). Setelah itu kemudian dilaksanakan survey dimana tempat yang disurvei adalah Jepara, Rembang, Kendal dan Tegal. Survey ini dilaksanakan oleh Departemen Perhubungan sebelum FS atau Studi Kelayakan dibuat. Kemudian baru dibuat FS / Studi Kelayakan Pelabuhan Tahun 2001.

Direktur LLASDP dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal kemudian bersepakat untuk membangun dermaga penyeberangan. (Direktur LLASDP

mempunyai kepanjangan tangan Satker LLASDP di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah). Dalam kesepakatan tersebut terdapat kesanggupan penyediaan lahan, pembangunan breakwater dan pengelolaan pelabuhan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal. Akhirnya terbangunlah pelabuhan penyeberangan dengan infrastruktur pendukung antara lain dermaga, breakwater, suar, kantor dan terminal. Pembangunan ini disandang oleh APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBD Kabupaten Kendal. Kemudian ditetapkan lintas penyeberangan Kendal-Kumai dalam SK Menteri Perhubungan No.KM 76 Tahun 2004 pada tanggal 11 Oktober 2004.

Selain riwayat pembangunan secara teknis tersebut, juga ada alasan politis yang mendasari pembangunan Pelabuhan Kendal bahwa latar pembangunan Pelabuhan Kendal awalnya tidak sesuai dengan Studi Kelayakan yang ada di daerah sendiri. Studi Kelayakan yang di Baperlitbang Kendal menuliskan bahwa tanah yang rencana akan dibangun pelabuhan termasuk ke dalam tanah yang tidak bagus. Namun, Pemerintah Kabupaten Kendal memaksakan pembangunan tersebut akan tetap dilaksanakan di kawasan Kaliwungu sebelah Utara dikarenakan pada daerah tersebut akan dijadikan kawasan peruntukan industri. Berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut, maka Pemerintah Daerah tetap membangun pelabuhan di Kaliwungu yang terintegrasi dengan kawasan industri dengan harapan dapat menarik investor sehingga pendapatan Kabupaten Kendal

sendiri kedepannya dapat meningkat tajam.

b. Pengembangan Pelabuhan Kendal

Pelabuhan Kendal yang tadinya hanya berperan sebagai Pelabuhan Penyeberangan saja, kini menjadi Pelabuhan Niaga juga. Masih berkaitan dengan riwayat pembangunan Pelabuhan Kendal sebelumnya, lokasi pelabuhan kendal masih didalam kewenangan daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Kala itu, untuk mengantisipasi stagnasi di Pelabuhan Tanjung Mas tersebut maka otoritas pelabuhan akan memfungsikan Pelabuhan Kendal untuk mengatasi *overflow* di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Pelaksanaan pengalihfungsian tersebut sudah ada *time schedule* agar dioperasionalkan.

Lokasi Pelabuhan Kendal tepat berada pada kawasan yang direncanakan sebagai kawasan strategis ekonomi dimana kawasan ini memiliki nilai komersil yang sangat menguntungkan apabila dikembangkan pelabuhan terutama untuk pendukung pelabuhan penyeberangan yang ada saat ini. Rencana pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi merupakan salah satu kebijakan yang dapat meningkatkan perekonomian wilayah. KSE Kendal merupakan Salah satu kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan strategis Provinsi Jawa Tengah dalam sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.

Sebelumnya, Pelabuhan Penyeberangan Kendal memiliki rute

lain yaitu Kendal-Karimunjawa. Namun rute tersebut dihapuskan dikarenakan peminatnya masih sedikit. Menurut Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2013 tersebut Kabupaten Kendal masih bagian dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dimana Kendal termasuk ke DLKr (Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan) dan DLKp (Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan) Tanjung Emas Semarang.

Ijin operasional Pelabuhan Kendal dalam tahap II sebagai pelabuhan curah kering/niaga sudah turun per tanggal 4 September 2019 melalui SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/36 Tahun 2019 dan Pelabuhan Kendal sebagai pelabuhan pengumpan regional.

Pelabuhan Niaga Kendal diresmikan pada tanggal 16 September 2019 oleh Bupati Kendal, dr. Mirna Annisa, M.Si. Namun dalam operasionalisasinya, Pelabuhan Niaga Kendal masih terkendala pada kedalaman dermaga dikarenakan dermaga mengalami pendangkalan yang semula memiliki kedalaman lima meter, sekarang hanya tiga meter, untuk menyikapi keluar-masuk kapal yang berlabuh masih harus mengandalkan pasang surutnya air laut. Meskipun masih terkendala kedalaman dermaga, setidaknya kapal-kapal yang sebelumnya sudah antri lama di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dapat merapat di Pelabuhan Niaga Kendal terlebih dahulu. Terkait dengan pendangkalan dermaga pelabuhan yang makin parah, Bupati Kendal sudah berkordinasi dengan KSOP untuk bisa melakukan pengerukan sehingga kedalaman

dermaga sesuai dengan kapasitas yang ada untuk kapal-kapal dengan kedalaman lima meter.

c. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dalam Pengembangan Pelabuhan Kendal

1. Ketersediaan Sarana Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan langkah awal dari pemerintah untuk merealisasikan suatu rencana yang ditujukan untuk mencapai tujuan besar. Sarana dan prasarana yang terpenuhi dapat mempermudah pemerintah untuk mengimplementasikan program yang telah direncanakan sebelumnya. Oleh sebab itu, pemerintah mempunyai kewajiban untuk merawat, memperbaharui dan mengadakan sarana dan prasarana demi berlangsungnya peran pemerintah yang maksimal.

Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Kendal termasuk program Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal yang memiliki tujuan awal untuk membuat Kendal menjadi kabupaten yang besar dan lebih maju. Dalam pembangunan sampai pengembangan Pelabuhan hingga menjadi Pelabuhan Niaga terbatas seperti sekarang ini telah dilakukan berbagai pembangunan sarana prasarana dari tahun 2001 sampai sekarang.

Ketersediaan sarana dan prasarana Pelabuhan Kendal dapat dilihat dari tahap awal pembangunan mulai dari perencanaan, pembangunan, operasionalisasi dan pengelolaan, serta pemeliharaan

pelabuhan. Pertama, pada tahap perencanaan dilakukan Penyusunan Masterplan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal sendiri. Hal tersebut dilakukan oleh Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Kendal dengan menyusun FS atau *Feasibility Study* pada tahun 2001.

Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dalam tahap perencanaan juga melakukan pengadaan sarana prasarana dengan menyediakan lahan melalui pembebasan tanah Kawasan Pelabuhan Kendal. Dahulu Kawasan Pelabuhan Kendal tersebut merupakan tanah milik masyarakat Desa Wonorejo, Kecamatan Kaliwungu yang kemudian dibeli oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dengan harga yang sesuai yang diperuntukkan untuk pembangunan Pelabuhan Kendal.

Pembebasan tanah kawasan Pelabuhan Kendal memang tidak lepas dari konflik masalah harga. Masyarakat yang memiliki tanah maupun tambak di kawasan tersebut yang tahu kalau nantinya tanah mereka akan dibeli dan diganti dengan pelabuhan akan otomatis menaikkan harga karena dari sisi masyarakat sendiri ingin mendapatkan harga yang setimpal namun besar walau harga tanah sebelumnya masih normal.

Pada proses pembangunan Pelabuhan Kendal, Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal berperan membangun berbagai fasilitas darat sebagai fasilitas atau infrastruktur pendukung dengan adanya pelabuhan itu sendiri. Berbagai fasilitas yang

telah dibangun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal kebanyakan memang dari fasilitas sisi darat, dikarenakan fasilitas laut yang membangun kebanyakan adalah dari Pemerintah Pusat dan KSOP. Fasilitas darat yang telah dibangun oleh Pemda Kendal diantaranya seperti gedung operasional Pelabuhan Penyeberangan Kendal, jalan akses masuk ke Pelabuhan Kendal, lampu PJU (Penerangan Jalan Umum).

Pada tahap pengelolaan dan pemeliharaan Pelabuhan Kendal, Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal berusaha semaksimal mungkin dalam mengelola aset Pemda Kendal ini. Pemda Kendal lebih menyoroti pengelolaan dan pemeliharaan pelabuhan bagian barat. Selain itu, khusus fasilitas sisi laut dipelihara oleh Pemerintah Pusat dengan KSOP dikarenakan Kendal dalam hal pembiayaan sangat tidak mampu sehingga harus mengajukan bantuan ke provinsi maupun pusat.

2. Ketersediaan Anggaran

Dari lingkup pemerintah manapun, baik pusat maupun daerah, semuanya memerlukan akses finansial yang memadai dalam menjalankan perannya selaku pelayan masyarakat. Finansial merupakan suatu rencana keuangan yang mencatat pengeluaran serta penerimaan tentang periode waktu tertentu. Anggaran menjadi penting karena sumber finansial dari pemerintah juga merupakan alat yang dapat menjadi motivasi pegawai, sarana pengembangan standar ukuran kinerja yang dapat digunakan untuk evaluasi, serta alat yang berfungsi

sebagai *coordinator* seluruh unit kerja dalam aktivitasnya pada pemerintahan.

Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Kendal bukan merupakan program yang kecil, pembangunan tersebut tergolong ke pembangunan daerah yang besar dikarenakan termasuk ke dalam program nasional. Sebagai program besar, pembangunan Pelabuhan Kendal memerlukan anggaran yang sangat besar pula dan melibatkan beberapa pihak bahkan sampai ke pemerintah pusat. *Stakeholder* yang terlibat dalam pendanaan pembangunan dan pengembangan Pelabuhan ini meliputi Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Pusat.

Dari tahap perencanaan, pembangunan, operasionalisasi dan pengelolaan semua mulai dilakukan dan dianggarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sendiri. Namun, Kabupaten Kendal termasuk tidak mampu dalam penganggaran sehingga pada praktiknya Kabupaten Kendal meminta bantuan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun ke Pemerintah Pusat sehingga dalam pembangunan Pelabuhan Kendal menggunakan anggaran dari APBD Kabupaten Kendal, APBD Provinsi Jawa Tengah, dan APBD dengan rincian sebagai berikut. (Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal, 2020)

- a. APBD Kabupaten Kendal: 181.993.623.000
- b. APBD Provinsi Jawa Tengah: 40.134.911.000

c. APBN Ditjen Hub Darat: 234.221.593.000

d. APBN Ditjen Hub Laut: 97.811.035.000

Total anggaran: 554.161.162.000

3. Kemitraan

Pembangunan Pelabuhan Kendal dilakukan oleh Pemerintah Daerah Pelabuhan dibantu dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Dinas Perhubungan Provinsi) serta Pemerintah Pusat (Dirjen Perhubungan). Selain ketiga *stakeholder* tersebut, Pemerintah Kabupaten Kendal juga merencanakan kerja sama dengan BUMN, swasta, dan masyarakat.

Kenyataan di lapangan mengenai kemitraan pembangunan Pelabuhan Kendal ini ditemukan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal hanya dapat bekerja sama dengan salah satu pihak saja antara BUMN dengan swasta, sehingga Pemda Kendal harus memilih salah satu diantara kedua pihak tersebut yang bersedia dalam pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Kendal ini.

Sementara ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal sudah berusaha meminta bantuan dan mengajukan kerja sama ke pihak BUMN yaitu PT. Pelindo. Namun terhitung hingga kini PT. Pelindo belum memberikan jawaban ke Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal. Sedangkan untuk memilih pihak swasta guna kerja sama dalam pembangunan pelabuhan ini Pemda Kendal harus memastikan dan mendapatkan jawaban dari pihak BUMN dahulu dikarenakan pihak

BUMN yang diprioritaskan dalam kerjasama pembangua Pelabuhan Kendal. Selain itu Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal juga melaksanakan kerjasama dengan masyarakat dalam pengadaan tanah pada tahap perencanaan sebelumnya.

4. Partisipasi Masyarakat

Keikutsertaan dan partisipasi masyarakat merupakan sorotan utama, karena masyarakat berada pada posisi subyek dan obyek dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Partisipasi masyarakat sangat penting karena merupakan faktor yang dapat mengoptimalkan peran dari pemerintah karena masyarakat sebagai subyek dan obyek kebijakan ikut serta membantu pemerintah dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

Masyarakat Desa Wonorejo, Kecamatan Kaliwungu merupakan subjek dan objek utama dari pembangunan Pelabuhan Kendal. Sebelumnya pada tahun 2002 telah dilaksanakan pembebasan tanah milik masyarakat yang kemudian dibeli oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal. Pada tahap tersebut masyarakat Desa Wonorejo mendukung dengan adanya Pelabuhan Kendal di Desa Wonorejo.

Banyak harapan masyarakat Desa Wonorejo dengan adanya pembangunan Pelabuhan Kendal ini, salah satunya adalah masyarakat berharap Pelabuhan Kendal dapat menjadi ladang pekerjaan untuk masyarakat Wonorejo khususnya masyarakat dengan pendidikan rendah.

d. Manfaat yang diperoleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dalam Pengembangan Pelabuhan Kendal

Besar harapan Kabupaten Kendal dalam memperoleh hasil dan manfaat dari pembangunan Pelabuhan Kendal. Dalam penelitian ini, manfaat yang diperoleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dapat dilihat dari harapan Pemda dengan realita yang diperoleh pemda. Manfaat dari segi harapan Kabupaten Kendal dengan adanya pembangunan Pelabuhan Kendal adalah pemerintah daerah ingin mendukung dan memajukan perekonomian khususnya untuk perekonomian Kendal dan perekonomian Jawa Tengah secara umum. Hal tersebut dikarenakan Pelabuhan Kendal yang dikembangkan menjadi Pelabuhan Niaga diharapkan bisa meningkatkan perekonomian Jawa Tengah sebesar 7% serta pengembangan pelabuhan ini termasuk ke dalam Rencana Strategis Nasional yang terdapat dalam PP.

Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal juga memperoleh manfaat lain seperti menambah Penghasilan Asli Daerah (PAD) dimana pendapatan tersebut nantinya akan masuk ke kas daerah. Adanya Pelabuhan Kendal yang dikembangkan menjadi Pelabuhan Niaga juga dimaksudkan untuk mendukung Kendal sebagai salah satu wilayah yang terpilih dalam Kawasan Ekonomi Khusus. Adanya pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Kendal dapat menciptakan lapangan pekerjaan

yang besar, terlebih jika nantinya pengembangan Pelabuhan Kendal ini telah selesai dan berjalan sebagai penopang kegiatan dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Selain terciptanya lapangan pekerjaan, secara otomatis dengan adanya Pelabuhan Kendal akan mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Kendal sendiri.

Dari sekian banyaknya manfaat yang ingin diperoleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dalam Pengembangan Pelabuhan Kendal, Pemda Kendal sendiri tidak mendapat hasil yang maksimal dari Pelabuhan Kendal. Data lapangan yang diperoleh penulis adalah Kendal mengeluarkan anggaran yang sangat besar dalam pembangunan Pelabuhan Kendal namun pendapatan Kendal tidak seberapa sehingga tidak seimbang antara pengeluaran dengan pendapatan.

Di samping manfaat bagi pemerintah, pembangunan pelabuhan Kendal juga memberikan manfaat bagi masyarakat. Salah satu contohnya adalah masyarakat mendapatkan pekerjaan dan tenaga kerja yang khususnya di Desa Wonorejo yang mana lokasinya berada di samping Pelabuhan Kendal dapat bekerja di Pelabuhan Kendal. Masyarakat Kendal khususnya masyarakat Desa Wonorejo sangat menantikan Pelabuhan Kendal dapat berjalan secara optimal dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Walaupun Pelabuhan Kendal yang bagian pelabuhan niaga belum dapat beroperasi dan pelabuhan penyeberangan yang kini hanya melayani penyeberangan Kendal-Kumai sudah memberikan banyak

manfaat bagi masyarakat. Nantinya jika pengembangan Pelabuhan Kendal dapat terselesaikan dan dioperasionalkan maka manfaat yang akan diperoleh sangat banyak baik itu untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal sendiri maupun untuk masyarakat luas.

KESIMPULAN

Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal berperan aktif dan sebagai aktor utama dalam pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Kendal ini. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal termasuk dalam peran yang besar dibandingkan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Pusat dikarenakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal berperan sebagai inisiator atau penggerak utama dalam pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Kendal walau program ini disetujui dan diresmikan oleh Pemerintah Pusat.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal telah menyediakan berbagai sarana prasarana baik utama maupun pendukung dalam pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Kendal dari tahap perencanaan, pembangunan, operasionalisasi, pengelolaan, maupun pemeliharaan seperti penyediaan fasilitas gedung operasional Pelabuhan Penyeberangan maupun Pelabuhan Niaga, lampu PJU (Penerangan Jalan Umum), jaringan listrik, dan jalan akses ke pelabuhan. Selain itu dari sisi pengelolaan dan pemeliharaan Pelabuhan Kendal, Pemda Kendal meminta bantuan kepada Pemerintah Pusat dikarenakan memerlukan biaya yang besar. Hal ini juga terbatas

dalam kewenangan dikarenakan adanya pembagian kewenangan pemeliharaan pelabuhan untuk sisi darat oleh Pemda Kendal dan sisi laut oleh Pemerintah Pusat.

Di samping hal tersebut, ketersediaan anggaran oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dalam pengembangan Pelabuhan Kendal sangat terbatas sehingga perlu bantuan dari pusat. Proses penganggaran sendiri dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal dengan DPRD Kabupaten Kendal. Segala keputusan yang berasal dari bupati selaku Kepala Pemerintahan harus mendapat persetujuan dari DPRD. Penganggaran pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Kendal berasal dari APBD Kabupaten Kendal, APBD Provinsi Jawa Tengah, dan APBN. Kontribusi penganggaran sesuai kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal termasuk ke dalam penganggaran yang besar dengan total Rp 181.993.623.000. APBD Kendal yang digunakan merupakan anggaran terbesar kedua setelah APBN Dirjen Perhubungan Darat.

Manfaat yang diperoleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dalam pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Kendal antara lain seperti meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pendapatan dari sewa lahan, retribusi, maupun pajak. Selain itu, adanya Pelabuhan Kendal juga memberi manfaat Kendal semakin ramai dan maju dikarenakan Pelabuhan Kendal yang strategis dan

terintegrasi dengan kawasan industri. Tidak hanya pemerintah yang mendapat manfaat dari pelabuhan ini, masyarakat juga mendapat manfaat seperti perekonomiannya terbantu dengan terserapnya masyarakat Desa Wonorejo yang bekerja di Pelabuhan Kendal. Namun di samping itu semua, dari pengeluaran pemerintah yang besar dalam membangun dan mengembangkan Pelabuhan Kendal, pendapatan yang diperoleh Pemda Kendal sangat tidak sepadan dikarenakan Pelabuhan Kendal sepi penumpang, jadwal kapal ke Kumai yang tidak pasti, serta Pelabuhan Niaga yang belum dapat beroperasi.

DAFTAR PUSTAKA

Manan, Bagir dan Kuntana Magnar. 1997. *Beberapa Hukum Masalah Tata Negara Indonesia*. Bandung: PT.Alumni.

Siagian, S.P. 2003. *Teori dan Praktek Kepemimpinan (cetakan kelima)*. Jakarta: Rineka Cipta. Hal 142.

UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Emas Semarang